

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab II ini memuat teori-teori dari para pakar maupun dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai konsep penelitian ini dan landasan teori berupa premis yang dapat digunakan sebagai data konfirmasi penelitian ini yang mengkaji mengenai Akuntabilitas Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Pengertian Akuntabilitas Publik menurut Abdul Halim (2012:20), sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah komitmen-komitmen dari individu atau penguasa yang memiliki amanah dan dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang meminta pertanggungjawaban dan keterangannya.”

Sedangkan pengertian Akuntabilitas Publik menurut Mahmudi (2013:9), sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya publik, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.”

Senada dengan Mahmudi, pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2011:20), sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai informasi dari menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.”

Kemudian menurut Musyidi (2013:44), pengertian akuntabilitas publik sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan telah ditetapkan secara bertahap.”

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik adalah komitmen dari pihak pemegang amanah (pemerintah) yang mendapatkan amanah untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan memberikan pertanggungjawaban dari menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh kegiatan dan aktivitas pihak pemegang amanah yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau publik yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas Publik

Berdasarkan pengertian Akuntabilitas Publik yang sudah dipaparkan sebelumnya, Akuntabilitas Publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan dana dan sumber daya publik yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

2.1.1.3 Dimensi atau Ukuran Akuntabilitas Publik

Menurut Mahmudi (2013:9) dimensi akuntabilitas publik sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Merupakan akuntabilitas lembaga publik yang berkaitan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum dan peraturan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan kejujuran pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya publik dan penghindaran penyalahgunaan jabatan.
- 2) Akuntabilitas Manajerial
Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif.
- 3) Akuntabilitas Program
Merupakan evaluasi mengenai tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan memberikan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan
Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya publik dan memperoleh manfaat serta dampak atas kebijakan tersebut.
- 5) Akuntabilitas Finansial
Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara efektif dan efisien, sehingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Dengan membuat laporan keuangan, lembaga publik dapat menggambarkan kinerja finansial pemerintahan kepada masyarakat.

2.1.1.4 Jenis-jenis Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2015:9), akuntabilitas publik dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- 1) Akuntabilitas Vertikal (Internal)
Merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Setiap petugas publik baik individu maupun kelompok secara bertahap memberikan pertanggungjawabannya kepada atasannya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara terstruktur maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 2) Akuntabilitas Horisontal (Eksternal)
Merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Setiap lembaga negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

untuk memberika pertanggungjawabannya atas semua amanat yang diterima dan dilaksanakannya untuk diberitahukan kepada masyarakat.

2.1.1.5 Tahapan-Tahapan Akutabilitas Publik

Menurut Abdul Halim (2007:21), Akuntabilitas Publik memiliki beberapa tahapan yaitu :

- 1) Pelaporan
Merupakan keharusan pemerintahan yang harus dilaksanakan untuk untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja pemerintahan dalam mengelola dana publik.
- 2) Pencarian Informasi atau Investigasi
Merupakan tugas dari masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya publik.
- 3) Penilaian atau Verifikasi
Merupakan tugas dari masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya publik.
- 4) Pengendalian dan Pengarahan
Merupakan tugas dari masyarakat untuk mengetahui pencapaian kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya publik.

2.1.1.6 Indikator Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002:21), akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu :

- 1) Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
- 2) Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
- 3) Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Manggaukang Raba (2006) akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu :

- 1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
- 2) Keberadaan kualitas moral yang memadai.
- 3) Kepekaan.
- 4) Keterbukaan.
- 5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- 6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mahmudi (2011:19) akuntabilitas publik memiliki beberapa indikator yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran
 - Kepatuhan terhadap hukum
 - Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas proses
 - Adanya kepatuhan terhadap prosedur
 - Adanya pelayanan publik yang responsif
 - Adanya pelayanan publik yang cermat
 - Adanya pelayanan publik dengan biaya murah
3. Akuntabilitas program
 - Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas kebijakan
 - Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil
 - Mempertimbangkan dampak dimasa depan

Berdasarkan pemaparan indikator yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:21), yaitu :

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)
2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mardismo, dengan alasan bahwa indikator-indikator tersebut yang umum selalu terjadi dalam permasalahan akuntabilitas publik di pemerintah.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:83), merupakan :

“Suatu proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan pelaporan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi yang hasilnya akan dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Senada dengan pengertian Abdul Halim, pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Erlina, Omar dan Rasdianto (2015:5), sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu proses dari pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan seluruh transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”

Sedangkan pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2016:195), sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi secara manual maupun komputerisasi yang mencatat seluruh transaksi keuangan daerah sebagai perwujudan dari akuntabilitasnya anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lainnya yang terkait dengan keuangan daerah.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan,

penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran lainnya yang terkait dengan keuangan daerah yang hasilnya dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, menjelaskan bahwa:

“Sistem akuntansi Keuangan Daerah sebagai alat untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi prosedur pencatatan yang menggunakan akuntansi *double entry* dan menggunakan alat-alat yang berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.”

2.1.2.3 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Ruang lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, meliputi sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD.

2.1.2.4 Tahapan-Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Prosedur
Tahapan pertama penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu memahami proses bisnis pada pemerintah daerah mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan sikluslah, akan dilakukan pengidentifikasian prosedur-prosedur yang perlu dibuat.
- 2) Menentukan Pihak-Pihak Terkait
Tahapan kedua penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu menentukan pihak-pihak terkait pada masing-masing prosedur.
- 3) Menentukan Dokumen Terkait
Tahapan ketiga penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu pengidentifikasian dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur dan menentukan pihak-pihak yang menggunakan dokumen tersebut.

- 4) Menentukan Jurnal Standar
Tahapan keempat penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu tim penyusun menganalisis SAP dan kebijakan akuntansi yang terkait.
- 5) Menuangkannya Dalam Langkah Teknis
Tahapan terakhir yaitu menyusun langkah teknis yang menjadi alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen yang diperlukan, dan pihak-pihak yang memperlakukan dokumen-dokumen terkait.

2.1.2.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddy Noerdiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014:201), indikator sistem akuntansi daerah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan keuangan

Menurut Abdul Halim (2014:44), indikator sistem akuntansi daerah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
- 2) Pengidentifikasian/Penggolongan adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak.
- 3) Pelaporan adalah transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan yang menjadi hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Indra Bastian (2010:319), indikator sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

Berdasarkan pemaparan indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menggunakan indikator Sistem Akuntansi Keuangan daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2014:44), sebagai berikut:

- 1) Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
- 2) Pengidentifikasian/Penggolongan adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak.
- 3) Pelaporan adalah transaksi ekonomi yang menghasilkan laporan keuangan yang menjadi hasil akhir proses akuntansi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Abdul Halim, dengan alasan bahwa indikator-indikator tersebut selalu kurang diperhatikan sehingga menjadi timbulnya permasalahan sistem akuntansi keuangan daerah.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah adalah catatan dari hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Ratu Wardarita, 2017:9).

Sedangkan menurut The Worl Bank (2008:12) pengertian kinerja pemerintah daerah sebagai berikut :

“Kinerja pemerintah daerah adalah cerminan dari kualitas proses yang sudah dilaksanakan agar tercapainya tujuan-tujuan pemerintah baik dalam pembangunan maupun yang lainnya.”

Sementara menurut Fadel Muhamad (2008:14) Kinerja Pemerintah Daerah merupakan Kinerja dari organisasi Atau Instansi Pemerintah Daerah.

Dan menurut Mohammad Mahsun (2013:25), Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang termuat dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah adalah catatan-catatan atau gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, misi dan visi pemerintah daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Fadel Muhamad (2008:14), indikator kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi
- 2) Efektivitas

Menurut Wibowo (2010:76), indikator kinerja pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai.
- 2) Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai.
- 3) Umpan Balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kerja, dan pencapaian tujuan.
- 4) Alat atau Sarana merupakan sumberdaya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses.
- 5) Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

Menurut Abdul Halim (2008:4), indikator Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.
- 2) Perbandingan Antara standar biaya dengan realisasinya.
- 3) Target dan persentase fisik proyek.

Menurut Mohammad Mahsun (2013:77), indikator Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan semestinya.
- 2) Indikator proses (*Process*), adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3) Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non-fisik.
- 4) Indikator hasil (*Outcome*), adalah segala sesuatu yang berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
- 5) Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
- 6) Indikator dampak (*Impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan pemaparan indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menggunakan indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang dikemukakan oleh Mohammad Mahsun (2013:77), indikator Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan semestinya.
2. Indikator proses (*Process*), adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non-fisik.
4. Indikator hasil (*Outcome*), adalah segala sesuatu yang berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
6. Indikator dampak (*Impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Mohamad Mahsun, dengan alasan bahwa indikator-indikator tersebut selalu kurang diperhatikan sehingga menjadi timbulnya permasalahan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.2 Kerangka pemikiran

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil atau cerminan dari proses yang sudah dikerjakan selama ini oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah harus diperhatikan untuk melihat hasil yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau rakyat baik berupa pelayanan maupun pembangunan. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai menjadi baik bukan terlihat buruk oleh masyarakat.

Namun kenyataannya, kinerja pemerintah daerah dinilai buruk oleh masyarakat. Adanya akuntabilitas publik yang menyebabkan masyarakat menilai kinerja pemerintah baik dan sudah meningkat dari sebelumnya. Namun tidak dengan kenyataannya, pemerintah daerah hanya menampik semua kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak mempertanggungjawabkannya.

Kinerja pemerintah daerah akan dinilai buruk jika sistem akuntansi keuangan daerahnya masih belum baik. Maka, kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya hubungan antara hubungan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan hubungan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Rendahnya akuntabilitas publik yang berdampak langsung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merespon dan melihat secara langsung kinerja pemerintah daerah bagaimana. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pendapat diatas didukung oleh konsep yang dikemukakan oleh Suwandi (2015:21) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik yang baik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja aparat pemerintah daerah dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk merespon secara proporsional terhadap kinerja pemerintah daerah.

Teori-teori yang dikemukakan diatas didukung dengan hasil penelitian terdahulu seperti halnya sebagai berikut :

- 1) Menurut Asrini (2017), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu hal ini sejalan

dengan hipotesis penelitian. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu.

- 2) Menurut Hari Eka Setiayawan dan Muhammad Safri (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 3) Menurut Nopriansyah Putra, Erlina dan Tapi Anda Sari (2016), menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan referensi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah disuatu daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dan dana yang sudah diberikan oleh masyarakat. Namun sistem akuntansi keuangan daerah di suatu daerah belum tentu baik sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah masih belum maksimal. Akibatnya kinerja pemerintah daerah yang menjadi buruk.

Pendapat diatas didukung oleh konsep yang dikemukakan oleh mardiasmo (2009:84) bahwa hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai

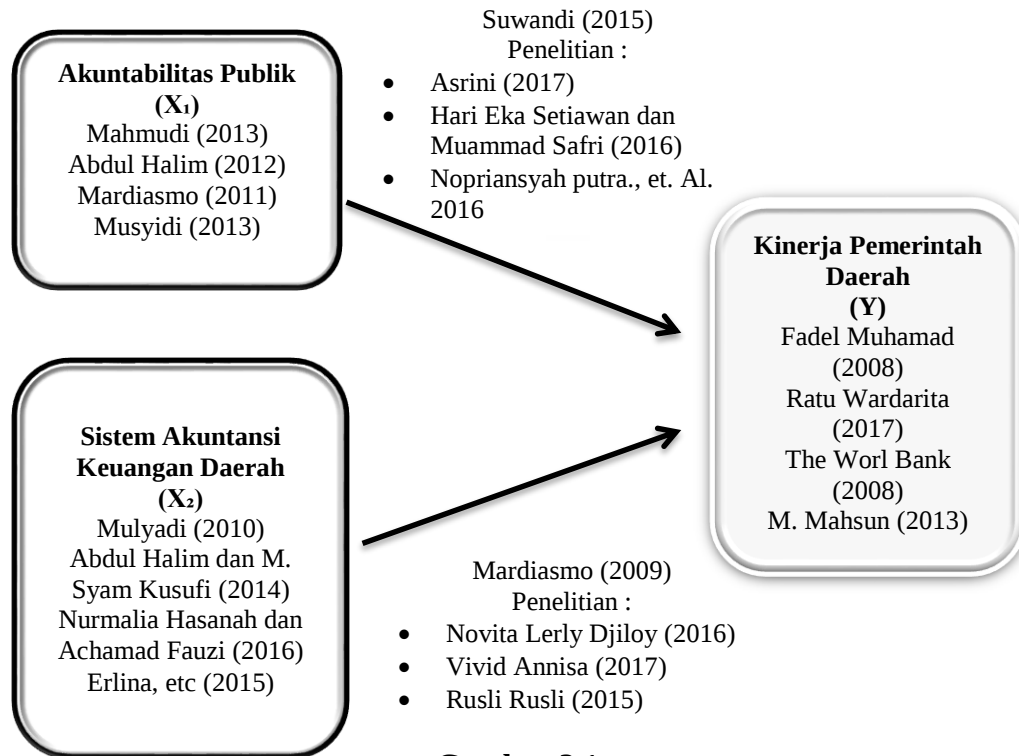
tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Teori-teori yang dikemukakan diatas didukung dengan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

- 1) Menurut Novita Lerly Djiloy (2016) menyimpulkan bahwa Semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi maka akan semakin baik pula kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
- 2) Menurut Vivid Annisa (2017), menyimpulkan bahwa Sistem akuntansi dapat memberikan informasi atas keuangan yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dikatakan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan terhadap kinerja SKPD.
- 3) Menurut Rusli Rusli (2015), menyimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD perlu suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Berdasarkan referensi-referensi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian berupa kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012:39).

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti perlu berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H₂ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.